

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD'45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut *United Nations Development Programme*(UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Dalam *Indonesian Human Development Report*, dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan penyerapan tenaga kerja. Biasanya semakain tinggi pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya. Sebagian masalah yang muncul di negara yang sedang berkembang antara lain bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan jumlah orang yang bekerja baik meningkat maupun menurun yang diakibatkan oleh perubahan faktor tertentu yang diakibatkan oleh perubahan faktor tertentu yang mempengaruhinya merupakan gambaran jumlah tingkat penyerapan tenaga kerja. Secara garis besar, jumlah orang yang bekerja pada tahun 2004 menunjukkan angka 93,722,036 atau 90.14% terhadap angkatan kerja. Hal ini menunjukkan peningkatan angka penyerapan tenaga kerja sebesar 2,937,119 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2003 yang menunjukkan angka 90,784,917 atau sekitar 90.50% terhadap angkatan kerja. (BPS, 2004).

Selain pertumbuhan ekonomi yang harus diperhatikan adalah indeks pembangunan manusia yang masuk dalam kategori indikator pembangunan suatu daerah merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa indeks pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik. Data tersebut seiring dengan hasil evaluasi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Pemerintah Indonesia. Selama dua dekade terakhir, indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat/penduduk ternyata semakin membaik. Tingkat ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia ternyata cenderung semakin rendah. Data dari kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperlihatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam setiap indikator indeks pembangunan manusia dalam 40 tahun terakhir ini.

Jika indeks pembangunan manusia merupakan bagian dari indikator pembangunan, tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan dan jumlah komposisi tenaga kerja tersebut akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2004, di Indonesia terdapat 153.9 juta penduduk usia kerja atau sekitar 62.45% terdiri dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran (*Demand and Supplay*) tenaga kerja. Pada tahun 2004 terdapat variasi yang besar pada TPAK antarprovinsi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki TPAK dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling rendah dan Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa dari hasil pengevaluasian awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menemukan kekuatan ekonomi baru yaitu Sulawesi dan Kalimantan (BPS, 2004).

Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri terdiri dari luas wilayah daratan 127,267.52 km² dan luas pengelolaan laut 25,656 km², terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur, dan antara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan

adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dibagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) kota, 102 kecamatan dan 1,013 desa/kelurahan.

Tujuh kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat). Sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi kekayaan alam melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 40 persen perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dengan komoditas utama minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perlambatan atau menurun dalam periode 2011–2013. Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan rata-rata 4.02 persen, melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 salah satu penyebabnya karena pengaruh dari produksi sektor pertambangan yang mendominasi dan pertumbuhan sektor negatif (-0.11%). Kegiatan ekonomi utama masih bersifat ekstraktif, memanfaatkan sumber daya alam secara langsung (Bappenas, 2015).

Berdasarkan pada pembangunan wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten yang ditunjukkan dengan nilai indeks Wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi dan beradadi atas rata-rata nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong pada kelompok ketimpangan tinggi pusat pertumbuhan wilayah banyak

ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota (Bappenas, 2015).

Penyebab kesenjangan ekonomidan sosial di Provinsi Kalimantan Timur antara lain jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan dalam perekonomianmenimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki PDRB perkapita tinggi adalah Kota Bontang, Kutai Timur, dan Kutai. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah dengan potensi pertambangan dan industri pengolahan yang besar sehingga perekonomian berkembang pesat. Sejumlah perusahaan besar beroperasi di kota Bontang, diantaranya Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak), danIndominco Mandiri (batu bara). Bontang juga memiliki kawasan industri petrokimia dan merupakan kota yang berorientasi di bidang industri, jasa serta perdagangan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya PDRB perkapita di Kota Bontang.

Terlepas dari nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang tinggi, bukan berarti Provinsi Kalimantan Timur memiliki angka tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2012, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Namun, selama kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan (BPS Kaltim, 2014).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Ichwansyah mengatakan penurunan ini disebabkan adanya upaya peralihan konsentrasi struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari sektor pertambangan dan industri pengolahan ke pertanian. “Besarnya penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ini menyebabkan turunnya angka pengangguran sekaligus jumlah angkatan kerja yang ada di Kaltim” ujarnya ketika dihubungi *Bisnis*, Rabu (6/11/2013).

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja harus diimbangi dengan kualitas dari sumberdaya manusia di suatu daerah itu sendiri. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Pengukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi pada manusia dan masyarakat, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Kalimantan Timur. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengelompokan Wilayah Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Berdasarkan Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana indikator komposit indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup, konsumsi perkapita, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Timur?

- b. Bagaimana pengelompokan wilayah tingkat partisipasi angkatan kerja pada kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur?

1.3. Batasan Masalah

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah data yang digunakan adalah data sekunder BPS Provinsi Kalimantan Timur di mana data yang digunakan adalah data ketenagakerjaan tahun 2010-2014.

1.4. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indikator komposit indeks pembangunan manusia yang berupa indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, konsumsi perkapita, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui pengelompokan wilayah tingkat partisipasi angkatan kerja pada kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Dapat memberikan informasi pada masyarakat dan pemerintah mengenai pengaruh indikator komposit indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup, konsumsi perkapita, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Timur.
2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok wilayah yang telah terbentuk.
3. Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan pada daerah yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah

